

## Pancasila sebagai Landasan Etika Politik: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi

Nur Kholis Majid

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

\*Email untuk Korespondensi: nurkholismajid@staff.uinsaid.ac.id

---

### ABSTRAK

---

Dalam menghadapi dinamika politik kontemporer, relevansi dan kekuatan Pancasila sebagai landasan etika politik seringkali dipertanyakan. Globalisasi, pluralitas ideologi, perkembangan teknologi informasi, serta tantangan internal seperti korupsi, intoleransi, dan polarisasi politik, semuanya memunculkan kompleksitas tersendiri dalam mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui relevansi Pancasila sebagai landasan etika politik di era globalisasi, 2) mengetahui tantangan Pancasila sebagai landasan etika politik di era globalisasi, 3) mengetahui peluang Pancasila sebagai landasan etika politik di era globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang melibatkan analisis dan sintesis terhadap teks, artikel, buku, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Pancasila sangat relevan sebagai landasan etika politik di Indonesia, 2) tantangan Pancasila sebagai landasan etika politik ini antara lain: politik uang dan korupsi, fanatisme terhadap agama, suku, dan ras, penyebaran hoaks dan disinformasi, penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten, dan pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, 3) peluang Pancasila sebagai landasan etika politik antara lain: membangun politik yang bermoral dan berkeadilan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kualitas demokrasi, menjadi landasan untuk membangun ketahanan nasional, dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan

#### Kata kunci:

Pancasila  
etika politik  
era globalisasi

#### Keywords:

pancasila  
political ethics  
the era of globalization  
ma

*In facing contemporary political dynamics, the relevance and strength of Pancasila as the foundation of political ethics is often questioned. Globalization, plurality of ideologies, development information technology, as well as internal challenges such as corruption, intolerance and political polarization, all of which give rise to their own complexities in maintaining and implementing values Pancasila in daily political practice. The objectives of this research are: 1) determine relevance Pancasila as the basis for political ethics in the era of globalization, 2) knowing the challenges of Pancasila as foundation of political ethics in the era of globalization, 3) knowing the opportunities of Pancasila as a basis for political ethics in the era of globalization. This research uses library research methods that involve analysis and synthesis of texts, articles, books and other literature relevant to the research topic. Results achieved in this research are: 1) Pancasila is very relevant as a basis for political ethics in Indonesia, 2) challenges to Pancasila as a basis for political ethics include: money politics and corruption, fanaticism towards religion, ethnicity and race, the spread of hoaxes and disinformation, weak and inconsistent law enforcement, and the influence of foreign culture that is not in accordance with Pancasila values, 3) opportunities for Pancasila as a basis for political ethics, including: building moral and just politics, strengthening national unity and integrity, improving the quality of democracy, becoming a foundation for building national resilience, and creating a society prosperous and just*

---

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

---

## PENDAHULUAN

Istilah globalisasi banyak digunakan oleh para pemikir dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu sehingga masing-masing memberikan definisi yang berbeda-beda tergantung sudut pandangnya dalam memahami istilah tersebut. Istilah globalisasi sering digunakan untuk menggambarkan keterhubungan global dan saling ketergantungan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Globalisasi adalah suatu fenomena dimana berbagai bangsa dan budaya saling berinteraksi. Globalisasi menjadi suatu arena pertarungan antar budaya, dimana budaya yang kuat melakukan hegemoni dan budaya lokal mekalukan resistensi. Globalisasi merupakan jalan untuk infiltrasi dan hegemoni oleh budaya yang dominan kepada budaya yang subordinat. Karena globalisasi merupakan arena pertarungan maka hal ini akan berdampak pada lokalitas dan nasionalisme suatu bangsa. Pada era globalisasi, ketahanan nasional berperan penting dalam menangkal pengaruh buruk berbagai ideologi dan budaya asing. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa akan berinteraksi dengan ideologi dan budaya asing (Al Khanif, 2017).

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa menjadi panduan moral dan etika dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek politik. Sebagai suatu landasan etika politik, Pancasila menegaskan nilai-nilai seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, kemanusiaan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun, dalam menghadapi dinamika politik kontemporer, relevansi dan kekuatan Pancasila sebagai landasan etika politik seringkali dipertanyakan. Globalisasi, pluralitas ideologi, perkembangan teknologi informasi, serta tantangan internal seperti korupsi, intoleransi, dan polarisasi politik, semuanya memunculkan kompleksitas tersendiri dalam mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik sehari-hari.

(Mahendra, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Pancasila Sebagai Etika Politik" mengemukakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai etika dalam berpolitik menjadi acuan kegiatan politik masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini (Kartika, 2018) juga melakukan penelitian yang berjudul "Peranan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Etika Politik di Indonesia" mengemukakan bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan acuan normatif dalam etika politik di Indonesia, sehingga segala aktivitas politik termasuk penyelenggaraan negara, menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan (1) asas legalitas, (2) disahkan dan dijalankan secara demokratis, dan (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral.

Kemudian (Febriany & Dewi, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Nilai-Nilai Pancasila dan Dinamika Etika Politik Indonesia" mengemukakan bahwa etika politik adalah suatu hal yang paling penting bagi masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dijauhkan dari politik. Etika politik sangat dibutuhkan di setiap kondisi karena tujuan dari etika politik adalah membawa kebaikan bersama. Penerapan etika politik di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena masih ada tindak pidana korupsi yang jelas-jelas bertentangan dengan etika.

Dalam konteks yang demikian, penelitian mengenai peran Pancasila sebagai landasan etika politik menjadi semakin penting. Penelitian sebelumnya telah memberikan pandangan awal tentang peran dan implementasi Pancasila dalam politik, namun masih ada ruang untuk kajian lebih mendalam, terutama dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang konkret yang dihadapi Pancasila dalam menghadapi dinamika politik saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas diperoleh rumusan masalah penelitian ini, antara lain: 1) apa relevansi Pancasila sebagai landasan etika politik di era globalisasi? 2) apa saja tantangan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika politik di era globalisasi? 3) bagaimana peluang Pancasila sebagai landasan etika politik di era globalisasi?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui relevansi Pancasila sebagai landasan etika politik di era globalisasi, 2) mengetahui tantangan Pancasila sebagai landasan etika politik di era globalisasi, 3) mengetahui peluang Pancasila sebagai landasan etika politik di era globalisasi.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang relevansi, tantangan, dan peluang Pancasila sebagai landasan etika politik dalam konteks kekinian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori dan praktik politik di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuatan kebijakan yang lebih tepat dalam upaya memperkuat stabilitas politik, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan membangun kohesi sosial yang berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang melibatkan analisis dan sintesis terhadap teks, artikel, buku, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Adapun langkah-langkah dalam penelitian meliputi: 1) mencari dan memilih sumber data (buku, jurnal ilmiah, artikel online, laporan penelitian, dan lain sebagainya) yang relevan dengan judul penelitian, 2) membaca dan mencatat informasi; 3) menganalisis dan mensintesis data; 4) merumuskan kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Nilai-Nilai Pancasila

Dalam Dictionary of Sociology and Related Sciences, nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sesuatu yang mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat. Misalnya bunga itu indah, artinya kata “indah” adalah sifat atau kualitas. Dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Berbicara nilai berarti berbicara tentang hal yang ideal atau das Sollen, bukan das Sein (Mulyatno & Yosafat, 2022).

Menurut Max Scheler nilai-nilai yang ada itu memiliki tingkatan:

1. Nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenyakkan dan tidak mengenyakkan (die Wertreihe des Angenehmen und Unangenehmen), yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak;
2. Nilai kehidupan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan (Werte des vztalen Fuhrens) misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, kesejahteraan umum;
3. Nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (geistige werte) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat;
4. Nilai kerohanian. Dalam tingkat ini terdapat modalitas nilai dari yang suci dan tak suci (wermodalitat des Heiligen und Unheiligeri). Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi (Mulyatno & Yosafat, 2022).

Sedangkan menurut Notonagoro nilai dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia, untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas
3. Nilai kerokhaniaan, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas empat macam:
  - a. Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia.
  - b. Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (esthetis, goevel, rasa) manusia.
  - c. Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (will, Wollen, karsa) manusia.
  - d. Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhaniaan tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia (Mulyatno & Yosafat, 2022).

Berkaitan dengan pengertian nilai di atas, Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Dengan perkataan lain bahwa Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu mengandung nilai material dan nilai vital. Hal ini dapat dibuktikan dari sila-sila Pancasila yang tersusun secara sistematis. Hierarkis, dan bulat utuh (Zulfadli, Siallagan, & Nasution, 2022).

Nilai-nilai Pancasila juga mempunyai sifat objektif dan subjektif sekaligus. Objektif berarti sesuai dengan objeknya, umum, dan universal, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rumusan dari sila-sila pancasila menunjukkan adanya sifat-sifat abstrak, umum, dan universal.
2. Inti dari nilai-nilai pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam hidup keagamaan dan lain lainnya;
3. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok norma (kaidah) fundamental negara, tidak dapat diubah oleh orang maupun lembaga manapun kecuali oleh pembentuk negara, in casu PPKI yang sekarang sudah tidak ada lagi. ini berarti nilai-nilai pancasila akan abadi dan objektif.
4. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang menggantikan Ketetapan MPRS No. XX / MPRS / 1966 menegaskan bahwa pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah sumber hukum dasar nasional, walaupun tidak disebut secara rinci apa yang dimaksud dengan sumber hukum dasar nasional itu, dapat disimpulkan bahwa Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tetap memberi tempat yang tinggi pada pembukaan UUD 1945. Artinya pembukaan UUD 1945 secara filsafat tidak mungkin dapat diubah,

termasuk oleh MPR hasil pemilu karena mengubah pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan Negara hasil Proklamasi 17 Agustus (Zulfadli et al., 2022).

Selain itu Pancasila juga memiliki sifat-sifat yang subjektif, dalam arti keberadaan nilai-nilai itu bergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sebagai hasil penilaian dan pemikiran filsafat bangsa Indonesia.
2. Nilai-nilai Pancasila merupakan Filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia yang paling sesuai yang diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai petunjuk yang paling baik, benar, adil, dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Nilai-nilai pancasila mengandung keempat macam nilai kerohanian, yang manifestasinya sesuai dengan sifat budi nurani bangsa Indonesia (Suroto, 2015).

Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan dan motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan perkataan lain nilai-nilai pancasila menjadi suatu yang ideal (*das sollen*) dan diwujudkan menjadi kenyataan (*das sein*). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain:

1. Nilai Ketuhanan  
Nilai ketuhanan terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui dan mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa.
2. Nilai Kemanusiaan  
Nilai kemanusiaan terkandung dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Nilai ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, persamaan, dan perdamaian.
3. Nilai Persatuan  
Nilai persatuan terkandung dalam sila Persatuan Indonesia. Nilai ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Nilai Kerakyatan  
Nilai kerakyatan terkandung dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Nilai ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi demokrasi dan musyawarah mufakat.
5. Nilai Keadilan  
Nilai keadilan terkandung dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila bukan sesuatu yang abstrak dan mengawang-awang tetapi bersifat nyata dan membumi. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang berasal dari kehidupan masyarakat yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Oleh karena itu kehidupan masyarakat masyarakat dan bangsa Indonesia harus berlandaskan dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Hernadi Affandi, 2020).

### **Etika Politik**

Etika berasal dari bahasa Yunani, yang dalam bentuk tunggalnya yaitu *ethos* artinya kebiasaan, adat, akhlak, sedangkan dalam bentuk jamaknya yaitu *ta etha* artinya adat kebiasaan. Jadi etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Kodoati, 2023)

Menurut Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika merefleksikan nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara individu maupun kelompok (Salam, 1997).

Etika terbagi atas etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan kewajiban manusia dalam berbagi lingkup kehidupannya. Etika khusus dibedakan menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas tentang kewajiban manusia sebagai individu terutama terhadap dirinya sendiri dan melalui suara hati terhadap Tuhan. Etika sosial membahas norma-norma moral yang harusnya meentukan sikap dan tindakan antar manusia. Etika sosial memuat banyak etika yang khusus mengenai wilayah-wilayah dalam kehidupan manusia tertentu (Suseno, 1991).

Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya “negara-kota” atau suatu kota yang memiliki status negara kota dan Aristoteles merupakan orang pertama yang memperkenalkan kata politik. Aristoteles

mengatakan bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi antara seseorang dengan orang lain sudah pasti akan melibatkan hubungan politik (Hunayati, 2016).

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha ini berkaitan dengan berbagai kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem dan cara melaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut (Budiardjo, 2003).

Etika politik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam berpolitik (Cahyadi, 2021). Etika Politik merupakan prinsip moral tentang baik-buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Etika politik juga dapat diartikan sebagai tata susila (kesusilaan), tata sopan santun (kesopanan) dalam pergaulan (H.A.W, 1997).

Etika politik mengandung aspek individu karena ia membahas masalah kualitas moral pelaku. Selain itu etika juga mengandung aspek sosial karena ia merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil. Etika politik menuntut kekuasaan dalam negara agar dalam penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku, demokratis, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral (Cahyadi, 2021).

Etika politik termasuk wilayah etika sosial yaitu membahas norma-norma yang seharusnya menentukan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Dalam perspektif etika politik, manusia memiliki dimensi politis. Dimensi politis manusia, dapat dikaji dari tiga hal. Pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Kedua, manusia dengan dimensi kesosialannya. Ketiga, dimensi politis kehidupan manusia. (Handoyo, Wijayanti, Irawan, Khomsani, & Hermawan, 2021).

Etika politik tidak hanya berkaitan dengan masalah perilaku etis atau tidak etis para politikus. Etika politik memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi tujuan politik, dimensi sarana, dan dimensi aksi politik. Dimensi 'tujuan' mengandaikan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan hidup damai didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Pemerintah dalam menyelenggarakan negara wajib memusatkan perhatian pada kesejahteraan masyarakat dan hidup damai. Kebijakan pemerintah harus dirumuskan dengan memperhatikan prioritas, program, metode, dan landasan filosofisnya. Dimensi sarana, meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara. Dimensi sarana mengandung dua pola normatif yaitu tatanan politik yang harus mengikuti prinsip solidaritas, pluralitas, dan struktur sosial ditata sesuai prinsip keadilan, dan kekuatan-kekuatan politik ditata dengan prinsip timbal balik. Dimensi aksi politik, pelaku memegang peran dalam menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan atau kualitas moral pelaku. Tindakan politik dikatakan rasional jika pelaku memiliki orientasi situasi dan paham permasalahan yang dihadapi (Haryatmoko, 2003).

### **Pancasila Sebagai Landasan Etika Politik**

Pancasila dan etika politik memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi karena selain Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang memberikan panduan moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku politik dan tata kelola pemerintahan, Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara.

Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika politik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Ketuhanan, nilai ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap keberadaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam politik. Dalam konteks etika politik, nilai ini mengajarkan pemimpin dan warga negara untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral dan spiritual, serta menghindari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan perilaku politik yang tidak bermoral.
2. Nilai Kemanusiaan, nilai ini menekankan pentingnya menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi keadilan, dan berperilaku secara beradab dalam interaksi politik. Etika politik yang berlandaskan nilai ini mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta menentang segala bentuk diskriminasi, penindasan, dan kekerasan.
3. Nilai Persatuan, nilai ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keragaman. Dalam etika politik, nilai ini mendorong para pemimpin dan warga negara untuk membangun dialog, kompromi, dan kerjasama lintas suku, agama, dan budaya demi terciptanya keharmonisan dan stabilitas politik.
4. Nilai Kerakyatan, nilai ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip demokrasi, dengan melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik melalui musyawarah dan pemilihan umum. Etika politik yang berlandaskan nilai ini menghargai pendapat dan kepentingan masyarakat, serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik.
5. Nilai Keadilan, nilai ini menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan, serta mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam etika politik, nilai ini mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mengupayakan keadilan dalam kebijakan dan praktik politik, serta mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, terutama yang berada dalam kondisi terpinggirkan.

Berdasarkan uraian di atas, Pancasila sangatlah relevan sebagai landasan etika politik karena:

1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan demokrasi, membantu menjaga keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.
2. Etika politik yang berlandaskan Pancasila mendorong dialog, musyawarah, dan kompromi sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan mencapai konsensus yang
3. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang terdapat dalam Pancasila menjadi pedoman bagi para pemimpin politik dalam mengambil keputusan dan bertindak. menguntungkan semua pihak.
4. Etika politik yang berlandaskan Pancasila mendorong adanya kepedulian terhadap kesejahteraan bersama dan menghindari tindakan yang merugikan atau mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu.
5. Etika politik yang berlandaskan Pancasila mendorong para pemimpin untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
6. Etika politik yang berlandaskan Pancasila menekankan pentingnya memahami bahwa setiap hak juga diiringi dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi.

### **Tantangan dan Peluang Pancasila Sebagai Landasan Etika Politik**

Kebebasan berpolitik pada era globalisasi seringkali mengabaikan norma-norma moral dalam masyarakat, sehingga hal ini menjadi problem etika politik yang bersifat umum dan meluas dari wilayah pusat hingga daerah. Tantangan Pancasila sebagai landasan etika politik pada era globalisasi antara lain:

1. Politik uang dan korupsi merupakan pelanggaran etika politik yang masih marak terjadi di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, belum sepenuhnya diinternalisasi oleh para politikus dan pejabat publik.
2. Fanatisme terhadap agama, suku, dan ras tertentu dapat memicu intoleransi dan perpecahan di masyarakat. Hal ini bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menekankan toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
3. Penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial dapat memicu polarisasi dan kebencian antar kelompok masyarakat. Hal ini dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, yang merupakan nilai fundamental Pancasila.
4. Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten dapat menyebabkan ketidakadilan dan memicu rasa frustrasi masyarakat. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila sebagai landasan etika politik.
5. Globalisasi dan budaya asing dapat membawa pengaruh positif dan negatif bagi Indonesia. Di satu sisi, globalisasi dapat membuka peluang untuk kemajuan bangsa. Di sisi lain, globalisasi juga dapat membawa pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Untuk mengatasi tantangan tersebut di atas ada beberapa alternatif solusi yaitu dengan cara memperkuat pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan, meningkatkan integritas dan moralitas para politikus dan pejabat publik, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, meningkatkan literasi digital masyarakat untuk melawan hoaks dan disinformasi, memperkuat nilai-nilai luhur bangsa dan budaya lokal di tengah arus globalisasi.

Mengingat Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal, maka nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika politik memiliki peluang besar untuk dapat diterapkan bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai dasar orientasi bagi penyelenggaraan kehidupan nasional, yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki fungsi memberikan pedoman secara normatif bagi kehidupan bangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai kemanusiaan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan bersifat universal, artinya nilai-nilai tersebut berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana saja dan kapan saja.

Peluang Pancasila sebagai landasan etika politik ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Tingginya Komitmen Masyarakat terhadap Pancasila. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait persepsi publik terhadap Pancasila pada tahun 2021 diperoleh temuan bahwa 82% (responden) masyarakat Indonesia menilai bahwa Pancasila adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki komitmen yang tinggi terhadap Pancasila.
2. Rendahnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Hasil survei Media Survei Nasional (Median) pada tahun 2021 terkait Pancasila di mata publik diperoleh temuan bahwa 49% (responden) masyarakat Indonesia menilai bahwa nilai-nilai Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dan

benar. Temuan ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk meningkatkan upaya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

3. Tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika politik. Kesadaran ini dapat dilihat semakin banyaknya diskusi dan publikasi tentang etika politik.

Pancasila sebagai landasan etika politik pada era globalisasi memiliki peluang sebagai berikut:

1. Membangun politik yang bermoral dan berkeadilan. Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan dapat menjadi pedoman bagi para politikus dan pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai ini dapat membantu para pemimpin untuk mengambil keputusan yang adil dan bermoral, serta mengedepankan kepentingan rakyat.
2. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti nilai persatuan dapat menjadi landasan untuk membangun rasa nasionalisme dan toleransi antar umat beragama.
3. Meningkatkan kualitas demokrasi. Nilai-nilai Pancasila seperti nilai kerakyatan dan keadilan dapat menjadi landasan untuk membangun demokrasi yang kuat dan berkeadilan di Indonesia. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila akan mengedepankan musyawarah mufakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
4. Membangun ketahanan nasional. Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dapat menjadi landasan untuk membangun ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang kuat akan mampu menghadapi berbagai ancaman yang dapat memecah belah bangsa.
5. Menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan dan kemanusiaan dapat menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan adalah masyarakat yang adil dan makmur, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya.

Untuk memanfaatkan peluang tersebut di atas perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan.
2. Mendorong internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3. Membangun budaya politik yang berlandaskan Pancasila.
4. Memperkuat peran lembaga-lembaga negara dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila.

Dengan memanfaatkan peluang-peluang tersebut, diharapkan Pancasila dapat menjadi landasan etika politik yang kuat dan efektif di Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan: 1.) Pancasila sangat relevan sebagai landasan etika politik di Indonesia, karena Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal dapat menjadi pedoman bagi para politikus dan penyelenggara negara untuk mewujudkan politik yang bermoral, menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat demokrasi dengan menjunjung politik musyawarah mufakat, kedaulatan rakyat, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. 2.) Tantangan Pancasila sebagai landasan etika politik ini antara lain: politik uang dan korupsi, fanatisme terhadap politik, suku, dan ras tertentu dapat memicu intoleransi dan perpecahan di masyarakat, penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial yang dapat memicu polarisasi dan kebencian antar kelompok masyarakat, penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten yang dapat menyebabkan ketidakadilan, dan globalisasi yang membawa pengaruh politik asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3.) Peluang Pancasila sebagai landasan etika politik antara lain: membangun politik yang bermoral dan berkeadilan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kualitas demokrasi, menjadi landasan untuk membangun ketahanan nasional, dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

## REFERENSI

- Al Khanif, D. (2017). *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LKIS.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Cahyadi, R. (2021). Etika Politik dan Pemerintahan. Pusaka Media.
- Febriany, F. S., & Dewi, D. A. (2021). Nilai-nilai pancasila dan dinamika etika politik indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(04), 690–695.
- H.A.W, W. (1997). *Etika Pemerintah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoyo, E., Wijayanti, T., Irawan, H., Khomsani, I., & Hermawan, D. (2021). Penguatan Karakter Anti Korupsi Bagi Lurah di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Abdimas*, 25(2), 119–126.
- Haryatmoko, J. (2003). Etika politik dan kekuasaan.

- Hernadi Affandi, S. H. (2020). *Pancasila-Eksistensi dan Aktualisasi*. Penerbit Andi.
- Hunayati, H. (2016). RELEVANSI Pandangan Gereja tentang Politik bagi Karya Pastoral di Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya. *SEPAKAT-Jurnal Pastoral Kateketik*, 3(1), 107–118.
- Kartika, I. M. (2018). Peranan nilai-nilai Pancasila dalam membangun etika politik di Indonesia. *Widya Accarya*, 9(2).
- Kodoati, M. C. (2023). Epikureanisme dan Stoikisme: Etika Helenistik untuk Seni Hidup Modern. *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 4(1), 91–102.
- Mahendra, P. R. A. (2015). Pancasila Sebagai Etika Politik. *Widya Accarya*, 4(1).
- Mulyatno, C. B., & Yosafat, Y. (2022). Praktik Bergotong-Royong dalam Hidup Bermasyarakat Sebagai Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4624–4634.
- Salam, B. (1997). *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*. PT Rineka Cipta.
- Suroto, S. (2015). Harkat dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 310–318.
- Suseno, F. M. (1991). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*.
- Zulfadli, Z., Siallagan, N. J. M., & Nasution, S. R. A. (2022). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Sila-Sila Pancasila Dalam Lambang Negara “Garuda Pancasila” Dengan Menggunakan Model Talking Stick Pada Siswa Kelas III SD Negeri 084089 Sibolga. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)*, 2(3), 1–6.